

PENGARUH KEMAMPUAN APARAT DAN KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA Studi di Pasar Lama Kota Tangerang

Edi Mulyadi¹, M. Athar Ismail², Muhamad Solehudin³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118
Email: ¹emulyadi@unis.ac.id
Email: ²aismail@unis.ac.id
Email: ³msolehudin@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemampuan aparat dan kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Lama Kota Tangerang. Untuk dasar teori dielaborasi substansi dan faktor-faktor pendukung serta penghambat implementasi kebijakan, kemampuan aparat, dan kondisi lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, suatu pendekatan penelitian yang secara mendasar menggunakan paradigma postpositivis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik utama berupa teknik survey dengan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan kemampuan aparat terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL di Pasar Lama Kota Tangerang. Hal ini terbukti dari hasil analisis uji t diketahui nilai t_{hitung} sebesar 13,624, dan dengan taraf signifikansi (p-value), diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) = 0,006. Demikian juga terbukti terdapat pengaruh positif dan signifikan kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL di Pasar Lama Kota Tangerang. Hal ini berdasarkan hasil analisis uji t menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 8,631 dengan taraf signifikansi (p-value) = 0,000. Ini berarti nilai Sig < nilai α (0,000 < 0,05). Sementara secara bersama-sama terbukti pula terdapat pengaruh kemampuan aparat dan kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL di Pasar Lama Kota Tangerang. Hal ini terbukti berdasarkan hasil analisis uji F, diketahui nilai F_{hitung} sebesar 107,015, dan dengan taraf signifikansi (p-value), 0,000. Ini berarti nilai Sig < nilai α (0,000 < 0,05).

Kata kunci: Pedagang kaki lima, kemampuan aparat, kondisi lingkungan, implementasi kebijakan

Abstract

The aim of this research is to analyze the influence of the capabilities of the authorities and environmental conditions on the successful implementation of the policy for empowering street vendors (PKL) at Old Market, Tangerang City. For the theoretical basis, the substance and factors supporting and inhibiting policy implementation, apparatus capabilities and environmental

conditions are elaborated. The research uses a quantitative approach, a research approach that fundamentally uses a postpositivist paradigm in the development of science, such as thinking about cause and effect, reduction to variables, hypotheses and specific questions, using measurement and observation, as well as theory testing. Data collection was carried out using the main technique in the form of a survey technique by distributing questionnaires. The results of the research prove that there is a positive and significant influence on the ability of the authorities on the successful implementation of the street vendor empowerment policy in the Old Market, Tangerang City. This is evident from the results of the t test analysis, it is known that the t value is 13.624, and with the significance level (p-value), it is known that the significance probability value (Sig.) = 0.006. Likewise, it is proven that there is a positive and significant influence of environmental conditions on the successful implementation of the street vendor empowerment policy in the Old Market, Tangerang City. This is based on the results of the t test analysis showing a t value of 8.631 with a significance level (p-value) = 0.000. This means the Sig value < a value (0.000 < 0.05). Meanwhile, together it is also proven that there is an influence of the ability of the authorities and environmental conditions on the success of implementing the policy of empowering street vendors in the Old Market, Tangerang City. This is proven based on the results of the F test analysis, it is known that the F value is 107.015, and with a significance level (p-value), 0.000. This means the Sig value < a value (0.000 < 0.05).

Keywords: Street vendors, apparatus capabilities, environmental conditions, policy implementation

A. Pendahuluan

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak bisa dilepaskan dari tumbuh kembangnya suatu wilayah. Demikian pula yang terjadi di wilayah Pasar Lama Kota Tangerang Provinsi Banten. Pemerintah Kota Tangerang sendiri sudah menyiapkan kawasan khusus bagi pedagang kaki lima (PKL) setelah Peraturan Daerah tentang PKL disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk penataan Kawasan Pasar Lama, Pemerintah Kota ini bahkan telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global untuk Penataan dan Pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A.Dimyati, dan Jalan Kali pasir Kota Tangerang. Perwal ini merupakan bukti perhatian dari Pemkot Tangerang terhadap masyarakat kecil dengan memberikan kekuatan hukum bagi pedagang di pasar lama.

Sebenarnya pedagang sektor informal terutama pedagang kaki lima ini bisa dipakai sebagai penarik wisatawan dari manca negara, seperti misalnya Yogya dengan jalan Malioboronya; Tokyo-Jepang dengan Naka Okachi-Machi dan Harajukunya; Bangkok dengan jalan Petchburi dan jalan Pratumannya; dan Singapura dengan Bugis street, Arab street, dan Change alley-nya.

Oleh karena itu keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata, dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat.

Implementasi Kebijakan

Upaya, pengetahuan, dan sumber daya yang ditujukan untuk menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan digambarkan sebagai 'tahap implementasi'

kebijakan (Howlett, 2018:2). Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009:295).

Dalam teori implementasi kebijakan George Edward III dalam Winarno (2012), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan meliputi kemampuan aparat, sumber-sumber, kecenderungan tingkah laku, dan struktur birokrasi. Menurut Sunggono (2014: 149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu dari aspek-aspek isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi.

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Permendagri nomor 41/2012 pasal 1 menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di sebuah Kota.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga ditetapkan beberapa Kriteria usaha Mikro, antara lain (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Sektor informal mendapat sambutan yang sangat luas secara internasional dari para pakar ekonomi pembangunan, sehingga mendorong dikembangkannya penelitian pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia.

Pemberdayaan PKL dilakukan dengan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan, peningkatan kualitas sarana/perengkapan PKL, bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan, atau dengan pemberian bantuan kredit bank sehingga para PKL bisa mengembangkan usahanya.

Upaya pemberdayaan para PKL diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan juga para PKL mendapat penertiban yang layak. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kemampuan Aparat

Kemampuan aparat menurut Dharma (2010: 43) adalah suatu faham dimana individu bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Kemampuan aparat dapat diartikan juga sebagai seperangkat atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan (Pabundu 2008: 57). Sejalan dengan itu, Gordon (1996: 574) mengatakan kemampuan aparat sebagai aliran atau faham yang lebih menekankan pada aspek keterampilan yang dimiliki individu

dari proses kerja yang harus dilaksanakannya.

Dwiyanto (2002: 216) menggambarkan bahwa kemampuan aparatur memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Memiliki komitmen yang kuat dan berjangka panjang terhadap keahlian mereka.
- b. Memiliki loyalitas yang lebih tinggi terhadap pekerjaannya daripada kepada pimpinannya,
- c. Selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan zaman, dan
- d. Dalam bekerja tidak terkait dengan jadwal regulernya.

Senada dengan pendapat tersebut, Osborne (2000: 16) mengatakan bahwa kemampuan aparatur adalah mereka yang memiliki karakteristik kesesuaian dengan standar profesi, pengetahuan dan kecakapan, hubungan antar manusia dan Kemampuan Aparat, pendidikan berkelanjutan, dan ketelitian profesional.

Perlu dipahami bahwa sebagaimana diungkapkan oleh Schlenker & Weigold, dan oleh Tedeschi (dalam Krieg et al, 2018: 110), bahwa sebagian besar karyawan berusaha untuk membuat kesan yang baik di tempat kerja, baik melalui promosi diri, menjilat, atau melampaui panggilan tugas untuk tampil berdedikasi. Menurut Toha (2006: 89) kemampuan aparatur meliputi kecakapan khusus, latar belakang pendidikan yang relevan, keterampilan yang memadai, dan etos kerja yang tinggi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pegawai yang memiliki kemampuan yang tinggi pada dasarnya terlihat dari, pertama, sikapnya yang tidak pernah menyerah dalam menangani tugas-tugas sulit yang dipercayakan kepadanya.

Kedua, pegawai yang memiliki kemampuan adalah memiliki pengetahuan yang relevan dengan bidang tugasnya. Jika pendidikan formal yang dimiliki tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, maka mereka akan berusaha mempelajarinya melalui pendidikan nonformal atau mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan bidang tugasnya atau mempelajari buku-buku yang terkait dengan bidang tugasnya, sehingga pengetahuan yang dimilikinya relevan dengan bidang tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Thuan dan Thanh (2020: 457-459) dengan mengacu pada beberapa ahli, kreativitas menunjuk pada menghasilkan ide, produk, dan proses yang baru dan berguna. Itu telah dianggap sebagai pendorong penting pengembangan organisasi, efektivitas, kelangsungan hidup dan kesuksesan jangka panjang (Anderson et al., 2014; Matsuo, 2018; Thuan dan Thanh, 2019). Khususnya, dalam lingkungan yang tidak pasti dan bergejolak, dibutuhkan produk dan layanan yang lebih bernilai untuk bersaing dengan pesaingnya.

Ciri berikutnya adalah mampu menjaga hubungan dengan individu lain. Hal ini berarti bahwa seorang profesional selalu menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari manusia lainnya. Mereka selalu menyadari bahwa manusia di sekitarnya merupakan sumber belajar yang sangat penting sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan dengan baik.

Terakhir ciri orang yang memiliki kemampuan kerja adalah menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut lingkungannya. Pegawai yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi meyakini bahwa pekerjaan adalah amanah sehingga melakukan pekerjaannya sama dengan baik tanpa memandang imbalan yang diterimanya setelah pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Menurut Ahmad (2012: 3) lingkungan hidup adalah sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Danusaputra dalam Darsono (2010: 6) mendefinisikan lingkungan sebagai semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Menurut Salim (2011: 2) lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam konteks lingkungan sosial organisasi publik, khususnya dalam birokrasi pemerintahan, interaksi dengan lingkungan khususnya lingkungan sosial, dapat menjadi pemikiran bersama. Keban (2008:184) mengambil pendapat Allison yang menyatakan bahwa banyaknya pemain di luar birokrasi dalam bentuk negosiasi dan tawar-menawar menunjukkan bahwa lingkungan begitu berpengaruh. Demikian halnya pendapat Wilson (2009) bahwa apa yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebenarnya ditentukan dari luar. Keban menguraikan bahwa pengaruh lingkungan berasal dari stakeholder.

Anderson (2006: 40) membagi lingkungan kedalam sumber daya alam, topografi dan sebagainya. Pandangan Anderson menjadi penting dalam dinamika kehidupan, khususnya dalam *public policy making*. Dalam konteks implementasi kebijakan, Kast (2011: 134) berpandangan, bila pelaksana kebijakan menerima informasi dari lingkungan tersebut, baik berupa kondisi empirik maupun kepentingan yang dimiliki oleh pemberi informasi.

Sementara L.L. Bernard dalam Siahaan, (2012: 12) membagi lingkungan atas empat macam, yaitu:

- 1) Lingkungan fisik (anorganik), lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisigeografis :tanah, udara, air, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
- 2) Lingkungan biologi (organik), segala sesuatu yang bersifat biotis.
- 3) Lingkungan Sosial.

Beberapa ahli hanya memberikan tiga macam pembagian lingkungan hidup, yaitu lingkungan fisik (*Physical Environment*), lingkungan biologis (*Biological Environment*), dan lingkungan Sosial (*Social Environment*).

Dalam ekologi terdapat dua pandangan yang mendasari berbagai macam model pendekatan manusia terhadap lingkungannya, yaitu pandangan immanen dan pandangan transenden. Pandangan immanen menempatkan manusia merupakan salah satu sub sistem dari ekosistem lingkungan, yang secara hakikat adalah merupakan satu kesatuan (terintegralisasi) dan terjalin demikian rupa dalam kaitan fungsional. Umumnya dapat dilihat di masyarakat pedesaan, yang masih mempertahankan keseimbangan alam dengan mendasarkan pada tradisi atau kebiasaan yang bersifat mithos dan mistis. Sedangkan pandangan transenden memandang lingkungan sebagai obyek yang dapat dieksploitir semaksimal mungkin, dengan menutup diri dari keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang akhirnya berusaha memusatkan ekosistem pada dirinya (Siahaan, 2012:25-27).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya (Arikunto, 2006). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, yaitu penelitian dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok.

Penelitian ini menggunakan sampel kuota sebesar 100 PKL dari populasi PKL Pasar Lama Tangerang yang berjumlah 300 pedagang. Sampel diusahakan representatif, yaitu mencerminkan semua unsur dalam populasi secara proposional. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah teknik kuesioner, yang merupakan teknik dengan membuat daftar pertanyaan secara terstruktur dengan tujuan untuk menggali data dari responden penelitian.

Dalam analisis data digunakan statistik deskriptif, regresi linier, dan uji hipotesis yang diajukan. Salah satu kegunaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebasnya (X) diketahui.

Rancangan uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan pada penelitian, apakah nilai-nilai statistik yang dihasilkan dari hasil analisis statistik dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Pada penelitian ini taraf signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5 %. Untuk menguji tingkat signifikansi koefisien korelasi dan koefisien regresi menggunakan Uji t (t-test).

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi berganda maka digunakan F-test. Selanjutnya dihitung koefisien determinasi (R^2) yang pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi data

Berdasarkan pengumpulan data lapangan dan analisis, dari jumlah responden 100 orang, yang mengembalikan kuesioner (valid) 97 orang. Pada variabel kemampuan aparat diperoleh hasil

mengenai penyebaran data kemampuan aparat, perolehan skor yang terendah 34 dan skor tertinggi 64, dengan skor total yaitu 5.102, rata-rata 52,60. Simpangan baku 7,33, modus 60, dan median 53.

Pada penyebaran data variabel kondisi lingkungan, perolehan skor yang terendah 31 dan skor tertinggi 58, dengan skor total yaitu 4.743, rata-rata 48,90, simpangan baku 4,72, modus 48, dan median 49.

Pada penyebaran data variabel keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL, perolehan skor yang terendah 34 dan skor tertinggi 70, dengan skor total yaitu 5.617, rata-rata 57,91, simpangan baku 8,06, modus 65, dan median 60.

Pengujian Hipotesis

Pengaruh Kemampuan Aparat terhadap Keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL

Berdasarkan analisis regresi dengan menggunakan SPSS diperoleh informasi bahwa analisis uji t pada tabel 4.11 di atas, menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 13,624. Nilai t hitung ini kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 dengan df $(97-2) = 95$, diperoleh nilai yaitu 1,985. Setelah dibandingkan ternyata nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($13,624 > 1,985$).

Demikian juga dengan taraf signifikansi (p-value), pada tabel di atas diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) = 0,000. Ini berarti nilai Sig < nilai α ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Aparat berpengaruh signifikan terhadap Kompetensi.

Pengaruh Kondisi lingkungan terhadap Keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan menggunakan SPSS diperoleh informasi bahwa analisis uji t pada tabel 4.10 di atas, menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 8,631. Nilai t_{hitung} ini kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 dengan df $(97-2) = 95$ diperoleh nilai yaitu 1,985. Setelah dibandingkan ternyata nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($8,631 > 1,985$). Demikian juga dengan taraf signifikansi (p-value), pada tabel di atas diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) = 0,000. Ini berarti nilai Sig < nilai α ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL.

Pengujian Pengaruh Kemampuan Aparat dan Kondisi lingkungan Secara Bersama-Sama terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan PKL

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, hasil uji F pada tabel Anova, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 107,015. Hasil F hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan F tabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan df $(94;2)$ diperoleh nilai F tabel yaitu, 19,402. Setelah dibandingkan ternyata nilai F hitung lebih besar daripada F tabel ($107,015 > 19,402$). Demikian juga Dengan melihat taraf signifikansi (p-value), pada tabel di atas diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) = 0,000. Ini berarti nilai Sig < nilai α ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kondisi lingkungan (X1) dan Kemampuan Aparat (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL (Y).

Selanjutnya setelah disimpulkan bahwa persamaan garis regresi berganda berpengaruh

signifikan, berikutnya perlu dicari seberapa kuat pengaruh dari variabel dan kemampuan aparat dan kondisi lingkungan secara bersama-sama terhadap diperoleh koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,547. Ini memberi arti bahwa sekitar 54,7% variasi yang terjadi pada Keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL dapat dijelaskan oleh Kemampuan Aparat dan Kondisi lingkungan.

Pembahasan

Berdasarkan analisis statistik yang telah diuraikan di atas dapat diketahui nilai-nilai hasil statistik pada masing-masing variabel dan tingkatan besarnya pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil analisis uji F diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 107,015, dan dengan taraf signifikansi (p-value), 0,000. Ini berarti nilai Sig < nilai α (0,000 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Aparat (X_1) dan Kondisi lingkungan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh sangat signifikan terhadap Keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL (Y). Hasil analisis Koefisien Determinasi diketahui bahwa pengaruh antara Kemampuan Aparat (X_1) dan Kondisi lingkungan (X_2) terhadap Keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL (Y) diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,547. Ini memberi arti bahwa sekitar 54,7% variasi yang terjadi pada Keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL Di Kota Tangerang, dapat dijelaskan oleh kemampuan aparat (X_1) dan kondisi lingkungan (X_2).

Hasil pengaruh kemampuan aparat dan kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL ini didukung oleh teori dan hasil penelitian yang telah disampaikan oleh beberapa pakar dan peneliti. Menurut Grindle (dalam Subarsono, 2005) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan kondisi lingkungan implementasi (*conteks of policy*).

Edward III (dalam Subarsono, 2005) lebih lanjut mengemukakan dua premis untuk keperluan studi implementasi kebijakan yaitu prakondisi-prakondisi apakah yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kemudian diidentifikasi faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja dari implementasi. Faktor-faktor tersebut meliputi empat variabel, yaitu: a).Kemampuan Aparat; b).Sumber daya; c).Disposisi; dan d).Struktur birokrasi.

Sementara proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*). Menurut White yang dikutip Suhendra (2006:77) menyebutkan bahwa pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik (*political will*), para penguasa sendiri. Sementara menurut Sulistyani (2004:80), secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan.

Dunn. (2003:610) menggambarkan 6 (enam kriteria atau dimensi evaluasi kebijakan (program) yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Asumsinya bahwa, pelaksanaan evaluasi program dimaksudkan untuk mengetahui berbagai permasalahan dan kendala di lapangan, di mana Satpol PP Kota Tangerang merupakan leading sector sebagaimana yang tercantum dalam perumusan masalah

penelitian ini.

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi program, sangat bergantung dari konsistensi dan komitmen aparat pelaksana dalam memperhatikan berbagai dimensi seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kemampuan aparat terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL di Kota Tangerang. Hal ini terbukti berdasarkan hasil analisis uji t diketahui nilai t_{hitung} sebesar 13,624, dan dengan taraf signifikansi (p-value), diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) = 0,006. Nilai Sig < nilai α (0,006 < 0,05).
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL di Kota Tangerang. Hal ini terbukti berdasarkan hasil analisis uji t menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 8,631 dengan taraf signifikansi (p-value) = 0,000. Nilai Sig < nilai α (0,000 < 0,05).
3. Terdapat pengaruh kemampuan aparat dan kondisi lingkungan secara bersama-sama terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL di Kota Tangerang. Hal ini terbukti berdasarkan hasil analisis uji F, diketahui nilai F_{hitung} sebesar 107,015, dan dengan taraf signifikansi (p-value), 0,000. Nilai Sig < nilai α (0,000 < 0,05).

Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL Pasar Lama, Pemerintah Kota Tangerang hendaknya terus melakukan peningkatan kemampuan aparat dalam penguasaan sistem penataan PKL, tata cara peningkatan kesadaran PKL agar merasakan kemanfaatan yang cukup tinggi.
2. Agar dilakukan terus peningkatan pemeliharaan kondisi lingkungan tempat PKL beroperasi karena tingkat kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan, kelancaran lalu lintas perlu dijaga.
3. Aparat agar melakukan peningkatan pemahaman atas faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan PKL, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Peningkatan pemahaman ini terutama fokus pada seksi pembinaan, penataan, dan penertiban seperti aspek ketepatan waktu, keseriusan, dan integritas.

Referensi

Buku

- Alisjahbana. (2006). *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Anderson, David Jr. (2006). *Computational Fluid Dynamics: The Basics With Applications*. Singapore: McGraw-Hill.

- Danisworo, Moh. (2010). *Diskusi Panel Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima*. Bandung: Rosdakarya.
- Darsono, V. (2010). *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Dharma, S. (2010). *Manajemen Kinerja; Falsafah dan Teori Penerapannya Cetakan ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (UGM).
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. Dkk (2002). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan UGM. Yogyakarta.
- Gaffar, Afan. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gordon, M. (2005). *Encyclopedia of Administration Public*. New York:Facts On File.
- Osborne, David dan Peter Plastrik. (2000). *Memangkas Birokrasi; Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. PPM. Jakarta.
- Pabundu, M.T. (2008). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim, Emil. (2011). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Song, Shangcong. (2020). *Street stall economy in China in the post-COVID-19 era: Dilemmas and regulatory suggestions*. *Research in Globalization 2* (2020) 100030.
- Suhendra, K. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, A. (2004). *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sunggono, Bambang. (2014). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).

Jurnal

- Howlett, Michael. (2018). Moving policy implementation theory forward: A multiple streams/critical juncture Approach. *Public Policy and Administration*, 0(0), 1–26.
- Erialdy, E. (2024). Employee performance appraisal using individual performance management. *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(1), 361-367.
- Ishani , Ghatak., & Soumendu Chatterjee. (2018). Urban street vending practices: an investigation of ethnic food safety knowledge, attitudes, and risks among untrained Chinese vendors in chinatown, Kolkat. *Journal of Ethnic Foods*, 2018; 5: 272e285.
- Kim, Choonghyun., & Lee, Jaekang. (2018). The Effect of Network Structure on Performance in South Korea SMEs: The Moderating Effects of Absorptive Capacity. *Sustainability* 2018,10,3174; doi:10.3390/su10093174.
- Krieg, Alexander., Li Ma., & Robinson, Patricia. (2018). Making a Good Impression at Work: National Differences in Employee Impression Management Behaviors in Japan, Korea, and the United States. *The Journal Of Psychology* 2018, 152 (2), 110–13.

- Lindell, Ilda., Christine, Ampaire., & Byerley, Andrew. (2019). Governing urban informality: re-working spaces and subjects in Kampala, Uganda. *IDPR*, 41 (1) 2019 <https://doi.org/10.3828/idpr.2019.4>
- Thuan, Le Cong., & Thanh, Bui Thi. (2020). Leader knowledge sharing behavior and follower creativity: the role of follower acquired knowledge and prosocial motivation. *Journal of Workplace Learning*, 32 (6), 457-471. DOI 10.1108/JWL-01-2020-0012.
- Young, Graeme. (2018). De-democratisation and the rights of street vendors in Kampala, Uganda. *The International Journal Of Human Rights* <https://doi.org/10.1080/13642987.2018.1492915>

Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Jakarta.